

# MASA DEPAN STUDI ISLAM DI PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (Sebuah Tinjauan Filosofis-Yuridis)

*Miftahur Rohman*

STIT Bustanul 'Ulum Lampung Tengah  
email: miftahur1rohman@gmail.com

*Sulthan Syahril*

UIN Raden Intan Lampung  
email: sulthan.syahril@yahoo.com

*Dini Fauziyati*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
email: dinifauzi233@gmail.com

**Abstract:** *Higher Education of Islamic Religion (PTKI) become an integral part of the development of Islamic civilization in Indonesia. According to the reason, it is needed a renewal of education system that can produce graduates who are globally competitive, have social skills, and have multicultural character. This research attempts to formulate an integration model of science and religion in Islamic studies at PTKI to create ideal graduates who are aspired. By tracking literature and using a philosophical approach to the theory of spider webs by Amin Abdullah, it can be concluded that Islamic studies at PTKI that focused on the study of religious sciences ('ulūm al-dīn), it must be held a dialogue with modern scientific disciplines and must always in critical-analytic studies. Practically this integration is realized in the form of reinterpretation of religious texts in order to answer complex social problems. Thus, besides having academic provision, graduates of PTKI are expected to have social intelligence, diversity character, and not rigid to differences.*

**ملخص:** أصبحت التربية الإسلامية في المرحلة الجامعية جزءاً لا يتجزأ في بناء الثقافة الإسلامية في إندونيسيا. بهذا تحتاج الحالة إلى التغيير والتجديد في نظام التربية المطبقة لتخريج الخريجين ذوي روح المنافسة العالمية، والقدرات الاجتماعية، والخلق المتعدد الثقافات. حاولت هذه الدراسة وضع نموذج التمزيج بين العلوم والدين في الدراسات الإسلامية في الجامعات الإسلامية بهدف تخريج الخريجين المثاليين. فبدراسة أنواع من المصادر والمراجع وبالدخل الفلسفي ونظرية شبكة العنكبوت لأمين عبد الله، يمكن الاستنتاج أن الدراسات الإسلامية في الجامعات الإسلامية المرتكزة على دراسة العلوم الدينية لا بد من ربطها بالعلوم العصرية ولا بد أن تكون الدراسة في ظل الدراسة النقدية والتحليلية. وفي الواقع، كان هذا التمزيج

يتمثل في استنباط المعنى الجديد من النصوص الدينية لحل المشاكل الاجتماعية التي أصبحت متعقدة. بهذا فعلى خريج الجامعات الإسلامية أن يستولوا على البضائع الأكاديمية ويجانب ذلك أن يكون لهم الذكاء الإجتماعي وقبول التنوعات وسماحة لمواجهة الاختلافات

Keywords: Studi Islam, PTKI, Integrasi agama ilmu

## PENDAHULUAN

Eksistensi pendidikan Islam pada pembangunan bangsa Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat dilihat dari sudut historis, sosiologis, maupun yuridis. Dari sudut historis, pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar yang panjang dalam membangun peradaban bangsa, terutama karena pendidikan Islam telah berlangsung sejak lama, yakni sejak masuknya agama Islam ke wilayah nusantara. Pada mulanya pendidikan di Indonesia berjalan secara sederhana bersifat informal dan nonformal. Sebagian tumbuh dari pusat-pusat pengajian kemudian berkembang menjadi pondok pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam.<sup>1</sup> Dari sudut sosiologis, nampak bahwa keberadaan pendidikan Islam di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan dari aspek yuridis, lembaga pendidikan Islam memiliki kedudukan yang kokoh dalam sistem pendidikan di Indonesia karena pendidikan Islam telah menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yaitu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang - dapat dikatakan merupakan tonggak kemajuan peradaban Islam di Nusantara. Sebuah bangsa yang maju tentu memiliki kualitas pendidikan tinggi yang baik. Karena perguruan tinggi merupakan tempat bersemainya benih-benih ilmu pengetahuan melalui program riset yang dikembangkan. Meskipun perguruan tinggi memiliki posisi yang kuat, akan tetapi semakin derasnya arus perkembangan zaman menuntut perubahan dan pembaharuan, khususnya di PTKI. Hal ini nampaknya menjadi suatu keharusan, mengingat semakin ketatnya persaingan di era revolusi industri 4.0, terutama dalam menghadapi pasar bebas di kawasan regional maupun dunia internasional.

Berbagai perubahan di era global yang ditandai dengan diberlakukannya WTO, AFTA, APEC membuat masyarakat di masa depan akan sangat terbuka disertai ketergantungan kultur yang bersifat global. Tenaga kerja asing

<sup>1</sup> Marwan Saridjo, *Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009), xv.

<sup>2</sup> Moh Sakir, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2014): 103–120.

yang akan masuk ke tanah air tak dapat dibendung lagi. Kecenderungan ini diperkuat oleh laju perkembangan teknologi informasi yang mudah diakses dan dapat mengubah sikap moral, sosial, dan intelektual seseorang dalam waktu yang cepat. Sektor jasa dan pariwisata akan tumbuh menjadi paradigma baru ekonomi, sedangkan kehidupan sosial, politik, dan keagamaan akan berubah bentuk dan fungsinya secara cepat sesuai dengan irama dan laju keterbukaan di tanah air.

Tuntutan modernisasi dan globalisasi tersebut menuntut kajian Islam yang saintifik guna menjawab tantangan perubahan zaman. Studi di PTKI seyogyanya tidak lagi terbatas kepada penggunaan paradigma *bayani*<sup>3</sup>, melainkan juga dengan paradigma-paradigma lain. Umat Islam dan tradisinya sulit berkembang dan mengembangkan diri apabila hanya berkuat pada kajian-kajian Islam klasik dan pada gilirannya akan mengalami kesulitan ketika harus berhubungan, bersentuhan, dan berkomunikasi dengan tradisi keilmuan sosial, humaniora, dan eksakta yang berkembang pesat di berbagai tempat, lebih-lebih di belahan bumi bagian Barat, Tiongkok, Jepang, dan di berbagai tempat lain.<sup>4</sup>

Respon yang cepat dan tepat dari sistem pendidikan Islam secara keseluruhan menjadi sebuah keniscayaan di era ini. Jika kaum Muslim tak hanya sekedar ingin *survive* di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga berharap mampu tampil di depan, maka reorientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam serta rekonstruksi sistem dan kelembagaan merupakan keniscayaan. Umat Islam tidak boleh berpangku tangan dan menonton dari luar seluruh perkembangan yang terjadi.<sup>5</sup> Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), misalnya, akan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi lulusan PTKI. Mampukah mereka berbicara banyak dalam kancah persaingan global atau sebaliknya justru akan termarginalkan.<sup>6</sup> Selain MEA, Indonesia juga harus menyiapkan diri untuk menghadapi perdagangan bebas dunia (WTO)

---

<sup>3</sup> Paradigma Bayani adalah paradigma studi dan pemikiran Islam yang berbasis kepada teks (al-nash), yaitu al-Quran dan Hadis yang mengutamakan proses berpikir deduktif-analogis-qiyas. Tumpuan utama paradigma bayani dalam memahami teks adalah lewat kaidah bahasa, yang kemudian menghadirkan kajian ushul fiqh klasik, sebagaimana diletakkan dasarnya oleh Imam al-Syafi'i.

<sup>4</sup> Tholhatul Choir and Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), viii.

<sup>5</sup> M Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 98-99.

<sup>6</sup> Heri Widodo, "Potret Pendidikan Di Indonesia Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2016): 293-308.

2020 dengan 153 negara dan 18 jenis profesi yang bersaing. hal tersebut akan melahirkan liberalisasi perdagangan.<sup>7</sup>

Secara filosofis, paradigma keilmuan di PTKI dapat ditilik dari perkembangan PTKI itu sendiri. Ketika muncul kegelisahan akademik akibat dikotomi sains dan agama, reintegrasi keilmuan ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi problem tersebut. Dalam diskursus ini, rekonsiliasi dan reintegrasi antara dua disiplin keilmuan sains dan agama dijadikan pijakan utama dalam desain pengembangan kurikulum PTKI. Diskursus ini sangat bergantung pada sistem pendidikan yang memungkinkan transmisi dan implantasi pengetahuan dalam segala bentuknya secara terpadu dan holistik. Sistem pendidikan Islam harus menekankan semua ilmu agama, namun pada saat bersamaan juga mencakup semua bentuk pengetahuan dan sains lainnya.<sup>8</sup> Reintegrasi tersebut selain berpijak pada ayat-ayat *qauli*, juga harus berpijak pada ayat-ayat *qauni*. Dalam perspektif ini, maka integrasi perlu dilakukan antara ilmu umum, yakni ayat-ayat semesta atau wahyu tidak tertulis (*kauniyyah*) dan ilmu agama, yakni ayat-ayat al-Quran atau wahyu tertulis (*qauliyyah*).<sup>9</sup> Amin Abdullah dalam formulanya integrasi-interkoneksi ilmu pengetahuan menempatkan al-Quran dan Hadis sebagai *core value* yang dikelilingi oleh disiplin-disiplin keilmuan lain.<sup>10</sup> Integrasi keilmuan ini yang kemudian dijadikan pijakan epistemologis pengembangan keilmuan di PTKI yang diawali di UIN Jakarta dan Yogyakarta.

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, tulisan ini berusaha memotret masa depan studi Islam di PTKI perspektif tinjauan filosofis-yuridis. Tinjauan filosofis dalam hal ini terkait paradigma keilmuan yang diadopsi oleh PTKI, yakni integrasi sains dan agama. Sedangkan aspek yuridis dalam hal ini merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi koridor trak PTKI dalam menjalankan amanat tri dharma pendidikan tinggi. Dengan demikian, rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu: a) Bagaimana model integrasi antara sains dan agama di PTKI?; b) Bagaimana model ideal lulusan PTKI yang dicita-citakan pada masa yang akan datang? Selanjutnya, penelitian ini bertujuan merumuskan bentuk integrasi antara sains dan agama di PTKI serta menatap cita-cita ideal *output* PTKI

---

<sup>7</sup> Nafi Muthohirin, "Menjawab Tantangan Dunia Kerja", dalam *Sindo Yogya*, Minggu 23 November 2014, 12.

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, "Islamic Education and Reintegration of Sciences: Improving Islamic Higher Education," *Media Syari'ah* 15, no. 2 (2017): 257–64.

<sup>9</sup> Akh Minhaji, *Tradisi Akademik Di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 76-89.

<sup>10</sup> M Amin Abdullah, "Integrasi Dan Interkoneksi Ilmu Pengetahuan", Paper dipresentasikan dalam *Acara Seminar Nasional Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal*, 2014, 15–16.

yang dapat bersaing di era globalisasi. Dengan pendekatan filosofis, penelitian ini menggunakan pelacakan studi literatur (*library research*) untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

## MODEL DIALOG SAINS DAN AGAMA DI PTKI

Terdapat empat pola hubungan antara agama dan ilmu: konflik (bertentangan), independensi (berdiri sendiri-sendiri), dialog (berkomunikasi), dan integrasi (menyatu dan bersinergi). Secara teoritik ada tiga kata kunci yang menggambarkan hubungan agama dan ilmu yang bercorak dialogis-integratif: *semipermeable*, yakni hubungan antara ilmu dan agama tidaklah dibatasi oleh tembok tebal yang tidak memungkinkan untuk saling berkomunikasi; *intersubjective testability*, yaitu setiap bangunan keilmuan atau penelitian memiliki kebenaran objektif dan subjektif dari seorang peneliti yang tidak dapat dipisahkan; dan *creative imagination*, yaitu penemuan baru atau teori baru yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan tidak lepas dari teori-teori yang mengitari sebelumnya.<sup>11</sup>

Epistemologi integrasi seperti yang dimaksudkan Amin Abdullah berupaya menghilangkan ketegangan ilmu pengetahuan yang bersifat atomistik dalam realitas yang sering tidak produktif dengan pengandaian atau seolah-olah meleburkan perbedaan menjadi satu rumpun. Jika hal tersebut masih berpotensi konflik maka diimbangi dengan interkoneksi yang lebih luwes dan mengerti dengan saling komunikasi atau dialog, saling keterkaitan atau keterhubungan, sehingga aksiologinya berupa bangunan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami sekelumit problematika kehidupan umat manusia yang dewasa ini semakin kompleks.<sup>12</sup> Dengan kata lain, hubungan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan idealnya adalah saling “dialog” dan jauh lebih baik jika keduanya dapat berbentuk “integrasi”, tidak dikotomi maupun konflik.

---

<sup>11</sup> Amin Abdullah, “Agama, Ilmu dan Budaya: Kontribusi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Ilmu Dalam Menghadapi Isu-Isu Islamic Studies Kontemporer,” Paper disampaikan pada *Seminar Nasional: Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 22–23 Oktober 2014.

<sup>12</sup> Muhammad Amin Abdullah, “Pengembangan Metode Studi Islam dalam Perspektif Hermeneutika Sosial dan Budaya,” *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2003): 1–19.

## INTEGRASI KEILMUAN JARING LABA-LABA (SPIDER WEB)

Paradigma keilmuan integrasi-interkoneksi yang menyatukan, tidak akan berakibat mengecilkan peran Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan peran manusia sehingga teralienasi dari dirinya sendiri, masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup yang mengitarinya. Ilustrasi hubungan jaring laba-laba (*spider web*) bercorak *teoantroposentris-integralistik* membentuk paradigma keilmuan yang saling terkait. Ilmu-ilmu alam (*natural science*), ilmu-ilmu sosial (*social science*), dan humaniora (*humanities*) kontemporer sebagai batu pijakan dalam menyelesaikan problem kehiduan manusia yang ditopang dengan kokoh oleh al-Quran dan Hadis dan dimaknai secara baru (*hermeneutis*) menjadi landasan pijak pandangan hidup (*weltanschauung*) keagamaan manusia yang menyatu dalam satu tarikan nafas keilmuan dan keagamaan.<sup>13</sup>

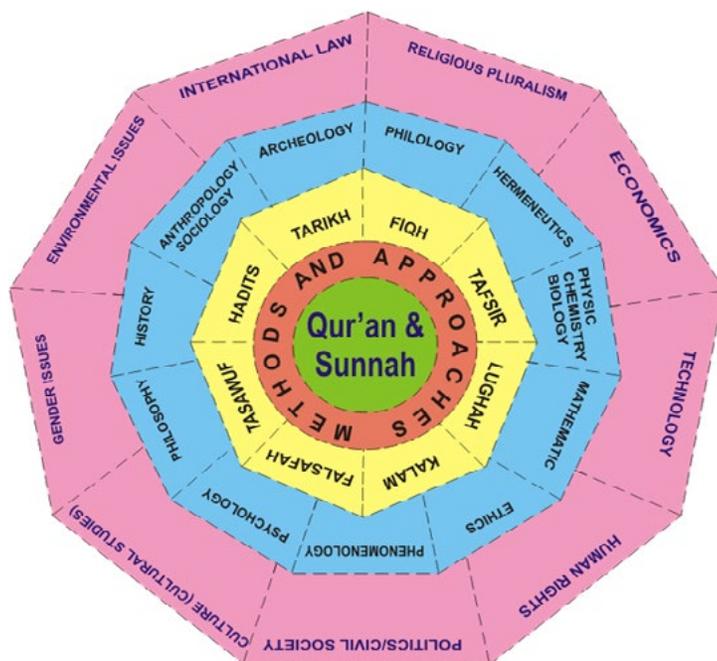
Al-Quran dan al-Hadis sebagai teks suci ajaran agama (*haḍarah al-nās*) berposisi sebagai pijakan inti (*hard core*) dan sentral ilmu-ilmu lainnya yang saling terkait (dialog) satu sama lain yang dipadukan dengan diskursus ilmu alam dan sosial (*haḍarah al-‘ilm*) dan diskursus filsafat (*haḍarah al-falsafah*).<sup>14</sup> Meminjam istilah Thomas Kuhn, rekonstruksi tersebut dilakukan dari *normal science* menuju *revolutionary science* sebagai usaha untuk meninjau ulang (*rethinking*) tafsir teks-teks keagamaan untuk menjawab pluralisme dan multikulturalisme yang tak terhindarkan.<sup>15</sup> Integrasi ilmu tersebut sesuai dengan tuntunan keragaman dan dinamika masyarakat. Paradigma ini menawarkan untuk melakukan penyadaran secara sosial bahwa ranah agama, ranah ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, maupun ranah humaniora, memiliki signifikansinya sendiri-sendiri. Apabila masing-masing horison tersebut dibaca secara padu dan saling terkait, maka akan menghasilkan pembacaan holistik yang sangat berguna bagi peradaban.

---

<sup>13</sup> Abdullah, *Islamic Studies...*, 106-107.

<sup>14</sup> M Amin Abdullah, "Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 1 (2014): 175–203.

<sup>15</sup> Thomas S Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: University of Chicago press, 2012), 94-95.



**Gambar 1: Horizon Jaringan Laba-laba (Spider web) Teoantroposentrik-Integralistik Amin Abdullah**

Studi keislaman di PTKI pada dewasa ini, menurut Amin Abdullah hanya terfokus pada lingkaran 1 dan jalur lingkaran lapis 2 (Kalam, Falsafah, Tasawuf, Hadis, Tarikh, Fiqih, Tafsir, dan Lughah). Itu pun boleh disebut hanya terbatas pada ruang gerak pendekatan keilmuan humaniora klasik. Pada umumnya PTKI belum mampu memasuki diskusi ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer, seperti yang tergambar pada jalur lingkaran 3 (Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Filsafat, dan berbagai teori maupun pendekatan yang ditawarkannya).<sup>16</sup>

Menilik jumlah PTKI yang menyentuh angka 700-an lebih dengan jumlah mahasiswa mencapai 800 ribu lebih,<sup>17</sup> PTKI dan *output* lulusan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara akan mewarnai kehidupan sosial-politik-keagamaan di Indonesia. Selain itu, tidak sedikit alumni PTKI yang menjadi tokoh masyarakat, bahkan tokoh nasional. Sehingga, integrasi sebagai paradigma

<sup>16</sup> Abdullah, *Islamic Studies...*, 108.

<sup>17</sup> Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, jumlah PTKI di seluruh Indonesia mencapai 789 Institusi dengan rincian 57 institusi negeri (PTKIN) dan 732 institusi swasta (PTKIS). PTKIN terdiri dari 17 UIN, 27 IAIN, dan 13 STAIN. Sedangkan PTKIS terdiri: 107 Universitas/FAI, 67 Institut, dan 558 Sekolah Tinggi. Jumlah mahasiswa secara keseluruhan berjumlah 872.943 dengan rincian 536.902 mahasiswa PTKIN dan 336.041 mahasiswa PTKIS. Lihat "Statistik Jumlah PTKI", dalam <http://emispendis.kemenag.go.id/ptki/>, diakses tanggal 27 Agustus 2018.

keilmuan perlu diimplementasikan secara praksis dan logis guna menelurkan lulusan ideal yang tidak hanya santun dan piawai secara spiritual, tetapi juga cakap secara sosial, dan memiliki karakter kebinekaan.

## INTEGRASI ILMU KEAGAMAAN ('*ULŪM AL-DĪN*): DARI TEORITIS KE PRAKSIS

Kompleksitas problem sosial yang dewasa ini mencuat, seperti adanya saling klaim kebenaran (*truth claim*), merebaknya isu SARA, dan menguatnya prasangka satu sama lain (*prejudice*) dalam kehidupan sosial-politik-keagamaan akan mereduksi nilai-nilai humanisme yang dijunjung tinggi leluhur bangsa ini. Kesemrawutan tersebut acap diakibatkan oleh faktor pemahaman terhadap dogma agama. Tak pelak, religiusitas menjadi peretas harmonisasi kehidupan sosial masyarakat dan kerap merambah ke disintegrasi yang berujung meningkatnya eskalasi konflik. Sejarah mencatat, agama kerap menjadi pemantik konflik sosial dalam masyarakat plural-multikultural. Untuk itu, PTKI sebagai institusi pendidikan Islam menjadi mercusuar untuk mempertahankan (*self defence*) nilai-nilai kebinekaan serta ajaran Islam yang inklusif-toleran.

Untuk mengurai sekelumit problematika sosial tersebut, studi di PTKI seyogyanya tidak lagi bersifat dikotomis dan parsial. Integrasi antardisiplin rumpun keilmuan mutlak diperlukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Karena sejak awal kelahirannya pada tahun 1950 di Yogyakarta,<sup>18</sup> PTKI selalu identik dengan ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan (*'ulūm al-dīn*), seperti tafsir, hadis, kalam, fiqh atau ushul fiqh, dan tarikh. Pengetahuan keislaman (*'ulūm al-dīn*) tersebut dipandang bersifat sektarian atau parsial. *Sectarian knowledge* tersebut melanggengkan oposisi biner antardiskursus ilmu pengetahuan keagamaan. Tafsir, hadis, kalam, fiqh, dan tarikh dianggap telah baku sebagai warisan intelektual sarjana Muslim abad pertengahan yang dianggap telah mapan dan tak perlu lagi dikritisi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sejarah lahirnya PTKI diawali di Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1950 yang mulanya merupakan Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII). Melalui PP Nomor 34 Tahun 1950, Fakultas Agama UII diambil alih oleh Pemerintah dan berubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Selanjutnya pada tahun 1957 berdiri Akademi Dinas dan Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. PTAIN dan ADIA inilah yang kemudian bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berada di Jakarta dan Yogyakarta melalui PP nomor 11 tahun 1960. IAIN Jakarta terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Adab, sedangkan IAIN Yogyakarta terdiri dari Fakultas Ushuluddin, Syariah, dan Tarbiyah. Lihat Marwan Salahuddin, "Model Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia," *Ulumuna* 18, no. 1 (2014): 121–138, <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna/article/view/155/149>.

<sup>19</sup> M. Amin Abdullah, "Toward Interdisciplinary Studies of Islam and Muslim Societies in Indonesia", Paper dipresentasikan dalam *The 6th Joint International Conference and Graduate*

Ilmu pengetahuan keagamaan (*'ulūm al-dīn*) masuk dalam kawasan “Islam historis”.<sup>20</sup> Konstruksi bangunan pengetahuan tersebut diformulasikan oleh para sarjana Muslim yang hidup pada zaman tertentu dengan segala problem yang mengelilinginya pada saat itu - yang sudah barang tentu sangat jauh berbeda dengan konteks sekarang. Oleh karena itu, secara natural disiplin ilmu pengetahuan tersebut harus terbuka terhadap kritik untuk menjawab problem sosial yang muncul.

Pengajaran dan pembelajaran *'ulūm al-dīn* dalam kategori tradisional-konvensional sangat lokal, supervisial, dan parsial. Pengajaran *'ulūm al-dīn* secara sadar atau tidak cenderung terjebak dalam perbedaan-perbedaan sekte dalam masyarakat Islam (*al-firaq al-Islamiyya*). Selain itu, *'ulūm al-dīn* cenderung lebih dangkal dan tidak komprehensif, sehingga mudah untuk menstimulasi konflik, belum lagi sangat sensitif terhadap kekerasan antarkelompok. Kehadiran *al-fikr al-Islamiy* atau pemikiran Islam (Islamic Thought) yang historis, sistematis, komprehensif, dan nonsektarian akan membantu mahasiswa PTKI dalam memahami *'ulūm al-dīn* secara komprehensif yang terhubung antarsubjek. *'Ulūm al-dīn* dan *al-fikr al-Islamiy* hendaknya selalu berdialog secara konsisten dan berkelanjutan dengan mengikuti perkembangan metodologi yang biasanya digunakan dalam diskursus ilmu alam, sosial, dan humaniora. Kontak dengan sistem pendidikan Barat di mana riset menjadi pijakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan perlu dilakukan dan diberi prioritas demi lahirnya Studi Islam (*Islamic thought*) atau *Dirāsāt Islāmiyyah*. Karena keterkaitan antara ketiganya tidak hierarki, melainkan bersifat dialogis, komplementer, dan negosiatif.<sup>21</sup>

Studi di PTKI, misalnya, selama ini hanya fokus mempelajari satu diskursus *'ulūm al-dīn* saja, tanpa adanya dialog satu sama lain. Teologi, filsafat, dan studi agama (sosiologi agama, antropologi agama, psikologi agama dan lain sebagainya) merupakan program riset masa depan yang potensial memberikan sumbangan berharga untuk mengatasi tantangan kemanusiaan universal. Filsafat khususnya, bukan sebagai “produk jadi”, melainkan sebagai aktivitas akal untuk melakukan *formulasi* dan *re-formulasi*, *evaluasi* dan *re-evaluasi* yang dapat membantu untuk menyegarkan atau mempertajam rumusan-rumusan teologi agar tidak hanya terfokus pada pemikiran *transcendental-spikulatif*. Ilmu

---

*Workshop on Islamic Studies Revisited: New Trends in the Study of Islam and Muslim Societies, Graduate School of Sunan Kalijaga State Islamic University and Faculty of Philosophy Georg August University of Göttingen Germany, tanggal 27-30 Oktober 2015.*

<sup>20</sup> Abdullah, *Islamic Studies...*, 53.

<sup>21</sup> Muhammad Amin Abdullah, “Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community,” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 391–426.

kalam atau teologi yang berdiri sendiri, misalnya, akan sulit untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan budaya kontemporer. Begitu juga dengan ilmu-ilmu agama lainnya akan bersifat transformatif jika ia bersentuhan dengan filsafat. Sedangkan filsafat hanya bisa memahami “makna” kehidupan yang mendalam jika memahami paradigma keagamaan dan bersentuhan dengan persoalan empiris. Adapun penelitian empiris fenomena agama tak dapat berdiri sendiri jika tidak bersentuhan dengan disiplin keilmuan kontemporer, seperti sosiologi, antropologi, HAM, dan disiplin lainnya yang masuk kategori lingkaran tiga dan empat dalam teori *spider web* Amin Abdullah.<sup>22</sup>

Diskursus tafsir dan kalam, misalnya, selama ini kerap dipelajari dari satu sudut pandang saja: tafsir sunni *an sich* dan abai terhadap diskursus lain di luar yang digandrunginya, misalkan tafsir syiah karena dianggap sesat oleh sebagian kalangan. Begitupun dengan studi ilmu kalam yang kerap hanya memicu saling klaim kebenaran karena hanya dipelajari secara parsial. Perangkap teks dan dogma tersebut telah memenjarakan nalar kritis seseorang sehingga menutup diri dari kemungkinan untuk memperoleh cakrawala yang lebih luas. Contoh lain dalam disiplin ilmu hadis, kritik-analitik terhadap *ulum al-hadis* dianggap tak relevan lagi karena dipandang akan merusak kemapanan yang telah terbentuk, lebih-lebih terhadap hadis yang dibukukan dalam *kutub al-sittah* karena ditulis oleh generasi *salaf*. Kritik dalam hal ini sebenarnya bukan berarti meragukan produk intelektual ulama *salaf* terdahulu, melainkan dengan adanya kritik-analitik yang dipadukan dengan metodologi yang baik akan membuka pengetahuan baru yang dapat berguna untuk mengatasi problematika sosial yang semakin berubah dan kompleks.

Secara praksis dan logis kritik-analitik yang harus dikembangkan dalam studi di PTKI adalah dengan memadukan disiplin ilmu modern, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, jender, HAM, teknologi, pluralisme, dan multikulturalisme. Disiplin keilmuan modern yang berkembang diposisikan sebagai lingkaran pendukung sumber utama dalam studi Islam di PTKI, yakni al-Quran dan Hadis. Kedua sumber tersebut tentu tak mungkin terfalsifikasi, melainkan harus direinterpretasi makna teks yang terkandung di dalamnya. Paradigma tersebut yang oleh Imre Lakatos disebut metodologi program riset.

---

<sup>22</sup> Jainul Arifin, “Teologi Kebinekaan dalam Pemikiran A. Amin Abdullah”, Tesis, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Filsafat Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, 88.

## IMPLEMENTASI METODOLOGI PROGRAM RISET DALAM STUDI ISLAM

Merujuk pada teori Imre Lakatos seorang filsuf ilmu asal Hungaria (1922-1974), menawarkan pola pengembangan ilmu pengetahuan yang disebut “metodologi program riset” dengan tiga lapis konseptual pengembangan ilmu: *hardcore*, *auxiliary hypotheses*, dan *series of theories*. Ketiga lapis tersebut tidak hanya memberikan ruang bagi tradisi dan budaya ilmiah, tetapi juga tersedia posisi “asumsi yang tak terbantahkan” yang berada pada lapis terdalam pada *scientific building*. Asumsi tak terbantahkan ini tidak lain semacam prinsip-prinsip dan nilai-nilai keyakinan, termasuk keyakinan keagamaan. Metodologi Program Riset merupakan pemikiran orisinal Lakatos. Gagasan ini muncul untuk mengembangkan sebuah pemikiran alternatif agar terjamin akan terjadinya kemajuan dalam teori-teori ilmiah. Menurut Lakatos, persoalan pokok terkait logika penemuan (*logic of discovery*) baru akan berhasil diselesaikan jika dikerjakan dalam kerangka metodologi program riset.<sup>23</sup>

*Pertama*, ‘Hard Core’ (Inti Pokok) merupakan asumsi dasar yang menjadi pijakan program riset ilmiah dan sekaligus menjadi ciri pokoknya. Posisi ‘Hard Core’ tidak dapat dimodifikasi serta dilindungi dari ancaman falsifikasi. Apabila seorang ilmuwan memaksa melakukan falsifikasi dan modifikasi terhadap asumsi fundamental ini, ia sejatinya telah keluar dari program riset yang dilakukan. *Kedua*, ‘Protective Belt’ (Lingkar Pelindung) yang terdiri dari beberapa hipotesa bantu (*auxiliary hypotheses*). Dalam aturan metodologis Program Riset, *Auxiliary Hypotheses* itu perposisi sebagai heuristik positif, satu aspek dari program riset yang memungkinkan ilmuwan membuat modifikasi dan penyesuaian-penyesuaian terhadap program risetnya. Heuristik positif menunjukkan bagaimana inti pokok program harus dilengkapi agar dapat menerangkan dan meramalkan fenomena yang nyata. *Ketiga*, ‘a series of theories’ (Serangkaian Teori) yang merupakan bentuk saling keterkaitan teori, di mana sebuah teori yang lahir merupakan buah dari teori yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, bagi Lakatos, yang harus dinilai sebagai ilmiah atau tidak ilmiah bukanlah teori tunggal, melainkan rangkaian beberapa teori. Yang terpenting dari serangkaian perkembangan ilmu dan rangkaian teori adalah ditandai oleh kontinuitas yang pasti.<sup>24</sup> Dengan demikian, implementasi integrasi antardisiplin keilmuan di PTKI dapat dilakukan dengan mengadopsi teori Program Riset Lakatos. Tafsir

<sup>23</sup> Mohammad Muslih, “Rekonstruksi Metodologi Pengembangan Sains Berbasis Agama,” *KALAM* 11, no. 2 (2017): 267–298.

<sup>24</sup> Imre Lakatos, “Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes,” *Criticism and the growth of knowledge* 4 (1970): 91–196.

teks keagamaan perlu dikaji ulang untuk menjawab tuntutan perubahan zaman. Tafsir teks keagamaan tersebut harus dilihat sebagai bentuk historisitas.

## REINTERPRETASI MAKNA TEKS

Dalam menafsirkan teks-teks al-Quran harus menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni melalui pendekatan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami makna al-Quran dapat berhubungan dengan kehidupan masyarakat Muslim kekinian. Secara historis, ahli tafsir dan ahli hukum Islam sering mengandalkan pendekatan linguistik dengan mengesampingkan konteks sosio-historis al-Quran. Padahal persinggungan antara produk tafsir klasik dengan tuntutan modernitas telah memunculkan asumsi bahwa produk tafsir periode pra-modern tidak lagi dianggap layak, kecuali oleh sejumlah kecil Muslim. Sebagian besar sisa hukum Islam sebagaimana yang ada dalam karya-karya fikih standar umumnya diabaikan di sebagian besar masyarakat Muslim saat ini. *Hudud* yang tidak lagi diterapkan serta penekanan pada kesetaraan gender menunjukkan bahwa banyak interpretasi yang ada di fikih klasik tidak lagi melayani kebutuhan umat Islam saat ini. Karenanya, sebagaimana dikatakan Šahrur, “al-Quran harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia”.<sup>25</sup>

Abdullah Saeed mengklasifikasikan ayat al-Quran ke dalam empat jenis, yaitu: ayat-ayat teologis, ayat-ayat kisah, ayat-ayat perumpamaan, dan ayat-ayat *ethico-legal* (hukum Islam). Saeed menyebutkan bahwa *ethico-legal text* merupakan salah satu bagian dari golongan ayat al-Quran yang menjadi fokus kajian hukum Islam. Ayat-ayat yang masuk dalam kategori *ethico-legal* adalah ayat-ayat tentang sistem kepercayaan: ayat tentang keimanan; ayat tentang ibadah, seperti perintah salat, puasa, haji, dan zakat; aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, dan warisan; perintah dan larangan; perintah jihad, larangan mencuri, hukuman terhadap tindak kriminal, hubungan dengan non-Muslim; dan perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antaragama dan pemerintahan. Ayat *ethico-legal* inilah yang menurut Saeed paling tidak siap ketika dihadapkan dengan realitas. Padahal pada saat yang bersamaan ayat-ayat inilah yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari sebagian besar umat Islam.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Muḥammad Shaḥrūr, *Al-Kitāb Wa Al-Qur’ān: Qirā’ah Muā’ Širah* (Damaskus: Sīna lil-nashr, 1992), 33.

<sup>26</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2005), 145-150.

Pemaknaan ulang (*reinterpretasi*) terhadap *ethico-legal teks* tersebut menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab tuntutan zaman. Mengingat teks tersebut memiliki hierarki yang memungkinkan untuk ditafsirkan ulang. Bagi Saeed ada lima hierarki nilai, yaitu: *pertama*, nilai yang bersifat kewajiban yang tidak berubah dan selalu menjadi dogma, seperti persoalan teologi, praktik ibadah, dan halal-haram. *Kedua*, nilai fundamental, yaitu nilai kemanusiaan dasar: *hifz al-dīn, al-nafs, al-naş l, al-māl* dan *al-'aql*. *Ketiga*, Nilai proteksional yang berperan menjaga keberlangsungan nilai fundamental, seperti perlindungan hidup, maka larangan membunuh adalah nilai proteksional. *Keempat*, nilai implementasional yang fungsinya merealisasikan nilai proteksional. Nilai ini dapat berbeda menurut konteks yang menyertainya. Contoh, hukuman potong tangan pada zaman awal Islam mungkin hukuman yang relevan, namun tidak untuk zaman sekarang. *Kelima*, nilai instruksional yang merupakan barometer perbuatan manusia. Ia diekstrak dari kandungan makna al-Qurān, khususnya tentang fenomena yang berlaku khusus pada zaman kenabian.<sup>27</sup>

Reinterpretasi teks-teks keagamaan menjadi jawaban sekelumit persoalan yang kerap ditemui di era sekarang. Studi di PTKI hendaknya menempatkan basis teks sebagai pijakan tertinggi, namun tetap bersinergi dengan diskursus modern, seperti pluralisme, multikulturalisme, sosiologi, humaniora, dan diskursus lainnya. Pengajaran dogmatis-tekstual harus dirubah menjadi humanis-kontekstual. Dengan demikian, cita-cita lulusan ideal PTKI dapat terealisasi.

## POTRET IDEAL LULUSAN PTKI

Potret ideal lulusan PTKI yang dicita-citakan adalah alumni yang berdaya saing global. Untuk itu, selain bekal akademik, *output* PTKI hendaknya berkarakter inklusif, humanis, serta multikulturalis. Kecapakan sosial tersebut mutlak diperlukan sebagai bekal untuk menghadapi realitas sosial yang fluktuatif serta persaingan global yang semakin kompetitif. Dengan mengimplementasikan bentuk pembelajaran integratif, lulusan ilmu eksakta, misalnya, dapat memahami disiplin ilmu sosial-humaniora yang sangat kompleks dan sukar diprediksi. Alumni ilmu eksakta selama ini telah terbiasa dengan ilmu pasti, sedangkan dalam diskursus ilmu sosial-humaniora sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Untuk itu, diperlukan pembacaan yang holistik guna memotret fenomena yang sedang terjadi. Alumni PTKI harus memiliki perilaku, sikap, dan pandangan yang berbeda dengan alumni pendidikan tinggi umum.

---

<sup>27</sup> Ibid.

## Sikap Spiritual

Mencuatnya sikap konservatisme dalam beragama di akhir-akhir ini - yang oleh Martin Van Bruenessen disebut *conservative turn*<sup>28</sup> menjadi sinyalemen negatif dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia. Konservatisme yang diawali dengan pemahaman tekstual teks-teks suci agama dipandang sebagai alarm negatif bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang plural. Paham keagamaan tersebut dianggap tak mampu bersinggungan dengan realitas keberagaman tafsir keagamaan sebagai buah intelektual. Oleh karena itu, PTKI diharapkan menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan lulusan berkarakter inklusif, humanis, dan multikulturalis. Karakter moderat tersebut sebagai bekal dalam menghadapi realitas kehidupan bermasyarakat yang - dewasa ini kerap bersinggungan dengan isu-isu yang mengganggu koeksistensi kehidupan sosial masyarakat. Moderatisme tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk nyata sebagai upaya menangkis paham eksklusif, intoleran, dan bahkan radikal.

## Sikap Sosial

Lulusan PTKI harus memiliki pandangan hidup yang luas dengan memotret peristiwa secara komprehensif. Belakangan ini muncul kekhawatiran akan merebaknya isu SARA pasca-lahirnya gerakan populisme Islam dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia.<sup>29</sup> Untuk itu, lulusan PTKI hendaknya menjadi yang terdepan dalam mereduksi isu SARA yang berkembang. Karena mudarnya koeksistensi sosial di kalangan akar rumput dapat mengakibatkan perpecahan di kalangan masyarakat menjadi dua kutub yang saling berseberangan. Pro kontra di antara dua kubu tersebut kerap saling lempar *statement* dengan klaim kebenaran masing-masing. Tak pelak benih-benih kebencian telah tertanam dan tumbuh di kalangan masyarakat. Hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan mengingat bangsa ini adalah masyarakat multikultur yang terdiri dari diversitas etnik dan agama. Jika tidak ditangani dengan baik serta tidak dilokalisir dari sekarang, hal tersebut dapat memecah belah kebhinnekan bangsa Indonesia dan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

Harapan besar ini cukup sulit diwujudkan manakala pendidikan tinggi Islam di negeri ini diimplementasikan dengan mengabaikan ketentuan dan peraturan yang semestinya diindahkan. Sebagai lembaga pendidikan bernapaskan keagamaan, alumni PTKI memiliki keunggulan ketimbang alumni

---

<sup>28</sup> Martin van Bruenessen, "Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the 'conservative Turn' of the Early Twenty-First Century," *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservation Turn"* (2013): 1–20.

<sup>29</sup> Vedi R Hadiz, "Islamic Populism in Indonesia: Emergence and Limitations," in *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (Routledge, 2018), 296–306.

pendidikan umum karena mereka dibekali dengan pengetahuan agama yang lebih banyak. Kelebihan ini akan sangat bermanfaat apabila ditunjang dengan penguasaan materi serta kemampuan skill yang mumpuni, sebagaimana yang tertuang dalam deskripsi minimal capaian pembelajaran (*learning outcome*) KKNI. Untuk itu, standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI) hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pemangku kebijakan PTKI, baik negeri maupun swasta. Karena, jumlah PTKI yang menyentuh angka ribuan hanya akan unggul secara kuantitas jika sistem pendidikannya tidak dijalankan berdasarkan amanat perundang-undangan yang berlaku. SN-DIKTI yang meliputi setandar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus diimplementasikan dengan baik. PTKI baik yang berbentuk universitas, maupun yang terendah seperti sekolah tinggi, harus melihat perundang-undangan tersebut dari kaca mata kebutuhan. Jika undang-undang tersebut dilihat sebagai suatu hal yang memberatkan, pendidikan ideal yang menjadi cita-cita pendidikan nasional kita akan jauh api dari panggung. Alih-alih menjadi lebih baik, justru terjerembab ke pusaran ketidakpastian.

## **BERPIJAK PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**

Pijakan yuridis implementasi kurikulum PTKI tentu merujuk pada undang-undang serta peraturan-peraturan menteri terkait. Mengutip Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>30</sup> Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan perundang-undangan tersebut.<sup>31</sup> Dengan demikian, kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini digunakan harus bergeser ke kurikulum pendidikan tinggi (KPT) sesuai amanat undang-undang tersebut.

KKNI merupakan penyetaraan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 19.

<sup>31</sup> Paristiyanti Nurwardani, dkk., *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, 2016), 1.

mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.<sup>32</sup> Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program diploma satu setara dengan jenjang 3, diploma dua setara dengan jenjang 4, diploma tiga setara dengan jenjang 5, sarjana setara dengan jenjang 6 KKNI, magister setara jenjang 8, dan doktor setara dengan jenjang 9.<sup>33</sup> Untuk itu, implementasi kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada penjenjangan KKNI tersebut.

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.<sup>34</sup> Dengan kata lain, perguruan tinggi memiliki hak otonom untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). Namun demikian, pengembangan tersebut harus mengacu pada SN-Dikti yang tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

SN-Dikti tersebut terdiri atas standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.<sup>35</sup> *Pertama*, standar nasional pendidikan yang meliputi: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran. *Kedua*, ruang lingkup standar nasional penelitian mencakup: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. *Ketiga*, standar pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: (a) standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, Pasal 3 Ayat 4.

<sup>34</sup> Nurwardani, dkk., *Panduan Penyusunan...*, 1.

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam SN-Dikti, capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Secara garis besar, kurikulum sebagai sebuah rancangan terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.<sup>36</sup> Sehingga, program studi memainkan peran yang cukup krusial dalam desain kurikulum yang akan diterapkan. Analisis kebutuhan masyarakat dan pasar serta perkembangan dan laju ilmu pengetahuan yang cenderung tak terkendali harus menjadi perhatian utama.

Capaian pembelajaran dalam SN-Dikti tersebut merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI yang mengandung empat unsur: unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, serta unsur kewenangan dan tanggung jawab. Keempat unsur tersebut merupakan kompetensi minimal yang harus dicapai.

**Tabel 1. Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi Mengacu KKNI**

No.	Jenjang Kualifikasi	Kompetensi Minimal yang Harus Dikuasai
1	S1 paling rendah harus setara dengan jenjang 6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang di hadapi</li> <li>2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural</li> <li>3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</li> <li>4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</li> </ol>

<sup>36</sup> Nurwardani, dkk., *Panduan Penyusunan ...*, h. 9.

2	S2 paling rendah harus setara dengan jenjang 8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</li> <li>2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</li> <li>3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</li> </ol>
3	S3 paling rendah harus setara dengan jenjang 9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.</li> <li>2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.</li> <li>3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</li> </ol>

Deskripsi capaian pembelajaran dalam rumusan capaian minimal pembelajaran di atas mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sebagai individu yang baru menamatkan pendidikan tinggi, alumni PTKI acap berhadapan dengan lingkungan sosial yang dinamis. Dinamika perubahan sosial tersebut tak jarang mengarah ke arah negatif, seperti merebaknya isu-isu negatif, ujaran kebencian, dan sikap intoleran antarsesama. Untuk itu, sikap dan tata nilai yang dimiliki oleh alumni PTKI harus mampu menjadi solusi atas problematika tersebut.



**Gambar 2. Implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Selanjutnya, standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman materi tersebut dirumuskan dengan mengacu KKNI. Dalam rumusan KKNI, jenjang strata satu (S1) minimal harus menjadi kaum terdidik yang aplikatif, solutif, serta bertanggung jawab terhadap problematika yang dihadapi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk jenjang strata dua (S2), alumni harus mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi melalui riset atau penelitian inovatif dengan pendekatan inter dan multi-disipliner serta diakui secara nasional. Sedangkan untuk jenjang strata tiga (S3), minimal mampu menghasilkan riset atau penelitian kreatif, original, dan teruji dengan pendekatan multi, inter, dan trans disiplin, serta diakui secara internasional.<sup>37</sup> Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9 ayat 2 dinyatakan pada tabel berikut :

**Tabel 2. Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran**

<sup>37</sup> Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

No	Progam	Capaian Minimal Materi
1	Diploma Satu	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap
2	Diploma Dua	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu
3	Diploma Tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
4	Diploma Empat dan Sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
5	Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
6	Magister, Magister Terapan, dan Spesialis	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
7	Doktor, Doktor Terapan, dan Sub Spesialis	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

## PENUTUP

Berdasarkan studi literatur yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa integrasi dalam studi Islam di PTKI menjadi jawaban untuk mengurai sekelumit problematika sosial yang kerap dijumpai dalam masyarakat multikultural, seperti koeksistensi yang terganggu, tercerabutnya sendi-sendi toleransi, mudahnya rasa saling menghargai, serta menguatnya isu SARA. Integrasi tersebut memadukan disiplin agama, eksakta, dan sosial-humaniora dalam bentuk praksis desain kurikulum dan pembelajaran. Ilmu-ilmu keagamaan (*ulūm al-dīn*) yang selama ini dikaji secara parsial diintegrasikan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial modern secara holistik dan padu.

Integrasi antar-disiplin keilmuan dalam studi Islam di PTKI harus terus dikembangkan demi terwujudnya sistem pendidikan Islam guna merawat peradaban. Karena tujuan pendidikan Islam bukan hanya melahirkan generasi yang pandai secara akademik, tetapi juga cerdas secara sosial, dan memiliki karakter kebinekaan. Pada akhirnya integrasi sains dan agama dalam studi di

PTKI merupakan agenda besar yang tidak akan bisa berjalan tanpa kontribusi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. "Agama, Ilmu Dan Budaya: Kontribusi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Ilmu Dalam Menghadapi Isu-Isu Islamic Studies Kontemporer." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Dengan Tema "Praxis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies" Oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 22–23 Oktober 2014.
- Abdullah, M. Amin, "Toward Interdisciplinary Studies of Islam and Muslim Societies in Indonesia", Makalah dipresentasikan dalam *The 6th Joint International Conference and Graduate Workshop on Islamic Studies Revisited: New Trends in the Study of Islam and Muslim Societies*, Graduate School of Sunan Kalijaga State Islamic University and Fakultas of Philosophy Georg August University of Göttingen Germany, tanggal 27-30 Oktober 2015.
- . *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. Pustaka Pelajar, 2006.
- . "Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 1 (2014): 175–203.
- Abdullah, Muhammad Amin. "Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 391–426.
- . "Pengembangan Metode Studi Islam Dalam Perspektif Hermeneutika Sosial Dan Budaya." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2003): 1–19.
- Aini, Nur. "Iklim Wirausaha Indonesia Terendah." *Koran Republika*, Nopember 24, 2014.
- Arifin, Jainul, "Teologi Kebinekaan dalam Pemikiran A. Amin Abdullah", Tesis, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Filsafat Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Azra, Azyumardi. "Islamic Education and Reintegration of Sciences: Improving Islamic Higher Education." *Media Syari'ah* 15, no. 2 (2017): 257–264.
- Van Bruinessen, Martin. "Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the 'conservative Turn' of the Early Twenty-First

Century.” *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservation Turn* (2013): 1–20.

Choir, Tholhatul, and Ahwan Fanani. “Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hadiz, Vedi R. “Islamic Populism in Indonesia: Emergence and Limitations.” In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, 296–306. Routledge, 2018.

Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago press, 2012.

Lakatos, Imre. “Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes.” *Criticism and the growth of knowledge* 4 (1970): 91–196.

Minhaji, Akh. *Tradisi Akademik Di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.

Muthohirin, Nafi, “Menjawab Tantangan Dunia Kerja”, dalam *Sindo Yogya*, Minggu 23 November 2014,.

Muslih, Mohammad. “Rekonstruksi Metodologi Pengembangan Sains Berbasis Agama.” *KALAM* 11, no. 2 (2017): 267–298.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2005.

Sakir, Moh. “Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2014): 103–120.

Salahuddin, Marwan. “Model Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia.” *Uhumuna* 18, no. 1 (2014): 121–138. <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna/article/view/155/149>.

Saridjo, Marwan. *Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai*. Bandung: PT. Raja Grafindo, 2009.

Shahrūr, Muḥammad. *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Muā? Şirah*. Damaskus: Sīna lil-nashr, 1992.

Nurwardani, Paristiyanti, dkk., *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, 2016.

Widodo, Heri. “Potret Pendidikan Di Indonesia Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).” *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2016): 293–308.

“Statistik Jumlah PTKI”, <http://emispendis.kemenag.go.id/ptki/>, diakses pada 27 Agustus 2018.